

IBU KOTA NUSANTARA (IKN) DAN REDISTRIBUSI SOSIO-SPASIAL: PERSPEKTIF GEOGRAFI KRITIS

NUSANTARA CAPITAL CITY (IKN) AND SOCIOSPATIAL REDISTRIBUTION: CRITICAL GEOGRAPHY APPROACH

Rangga Kala Mahaswa*, Siti Murtiningsih, Ari Bagus Panuntun

Universitas Gadjah Mada

E-mail: *mahaswa@ugm.ac.id

ABSTRACT

This article explains the socio-spatial redistribution that occurs during the development of Nusantara State Capital City (IKN). Despite only passing through the first phase, which is expected to be completed by 2024, the development of IKN has faced criticism from various positions. This research is oriented towards spatial production, which considers aspects beyond mere capital interests. The research method includes a critical analysis of the conceptual-geographical conflicts between the government's vision of urban development and the perspectives of various community groups regarding spatial justice mapped out in 16 main themes of discourse development on IKN. Through a critical geography approach, this research maps out spatial issues generated by the development of IKN and analyzes the socio-spatial inequalities and tensions currently occurring. The research findings suggest several key implications. The first is the implementation of the non-centralistic identity redistribution of IKN's urban space. Second, policy representation which still relies on political symbolism. Third, the natural landscape which is seen as a new commodity in terms of development. Lastly, the uncertainty of various external factors in influencing future governance of IKN as "A World City for All".

Keywords: Redistribution, Socio-spatial, Discourse, Nusantara, City development.

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan redistribusi sosio-spasial yang terjadi selama proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Meskipun baru melewati tahap pertama yang diekspektasikan selesai pada 2024, pembangunan IKN telah menuai kritik dari berbagai posisi. Orientasi penelitian ini adalah produksi ruang yang lebih memperhatikan aspek di luar sekadar kepentingan kapital. Metode penelitian ini mencakup analisis kritis terhadap konflik konseptual-geografis antara visi pemerintah mengenai pembangunan kota dan pandangan berbagai kelompok masyarakat tentang keadilan ruang yang terpetakan dalam 16 tema utama pengembangan wacana tentang IKN. Melalui pendekatan geografi kritis, penelitian memetakan masalah-masalah keruangan yang dihasilkan oleh pembangunan IKN serta menganalisis ketimpangan serta ketegangan sosio-spasial yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini mengindikasikan beberapa implikasi. Pertama, implementasi redistribusi identitas non-sentralistik dari ruang kota IKN. Kedua, representasi kebijakan menampakkan ketergantungan kepada simbolisme politik. Ketiga, alam dipandang sebagai komoditas baru dalam pembangunan. Terakhir, ketidakpastian berbagai faktor eksternal dalam memengaruhi tata kelola 'Kota Dunia Untuk Semua' di masa depan.

Kata Kunci: Redistribusi, Sosio-spasial, Wacana, Nusantara, Pembangunan Kota.

PENDAHULUAN

Selama ini, perencanaan pemindahan ibu kota baru Indonesia telah memasuki tahap pertama dari empat tahapan utama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023a). Tahap pertama pada 2020-2024 adalah pembangunan infrastruktur utama pemerintahan dan infrastruktur dasar.

Selanjutnya, pada 2025-2035 akan berfokus kepada pembangunan pusat perekonomian dan penelitian. Tahap ketiga pada 2035-2045 adalah pembangunan lanjutan infrastruktur dan pembangunan pusat ekosistem tiga kota. Terakhir, pada tahun 2045 dan seterusnya ialah pembangunan menuju 'Kota Dunia Untuk



Semua' yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan. IKN akan dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Setidaknya terdapat kriteria dasar alasan pemilihan Kalimantan Timur untuk IKN, salah satunya ialah aksesibilitas lokasi, minimnya bencana, dan potensi konflik yang rendah (Chan & Pribadi, 2022). Di sisi lain, terdapat pandangan skeptis dan kritis atas pembangunan IKN yang disebabkan oleh minimnya komunikasi dan pemaparan tahapan rencana teknis oleh pemerintah (Hairunnisa & Syaka, 2022; Ma'mun, 2023). Kekhawatiran ini muncul karena Pulau Kalimantan menjadi salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar yang mampu menampung heterogenitas ragam spesies endemik yang langka dan dilindungi. Terlebih, megaprojek pembangunan IKN semakin membuka peluang atas deforestasi lahan untuk kepentingan pembangunan, industri tambang, serta perkebunan sawit.

Menariknya, terdapat gelombang kritik yang lahir dari komunitas ilmiah yang dapat dipetakan menjadi beberapa poin, antara lain: permasalahan pengesahan UU IKN (Mahardika dan Saputra, 2022; Musu dkk., 2022), kapitalisasi wilayah (Sabiq dkk., 2023), komodifikasi alam (Kusumaningrum, 2023), deforestasi (Adinugroho dkk., 2022), pergeseran budaya (Ocsanda dkk., 2023), marginalisasi masyarakat adat setempat (Aulia dkk., 2023; Hidayat, 2023; Nugroho, 2022), anggaran IKN (Siswantoro, 2022), hingga desain istana presiden (Rosyadi, Handayani, d& Ernawan 2021). Dari sudut pandang pemerintahan dan kebijakan publik (Purnama & Chotib, 2023), pembangunan IKN diorientasikan agar memberikan dampak yang signifikan terhadap orientasi pembangunan kota di Indonesia saat ini sehingga dibutuhkan semacam pendekatan kritis dan mendalam untuk memahami cara perencanaan dan pembangunan yang diusung tetap mengedepankan asas-asas kemanusiaan dan kesejahteraan (Hexagraha, 2018). Meskipun terdapat imaji-imaji yang dilahirkan dari berbagai visi IKN sebagai bentuk realisasi pembangunan Generasi Emas 2045 seperti 'konsep kota hijau', 'kota pintar', dan 'kota dunia', peneliti melihat

urgensi peninjauan ulang beragam konsep-konsep yang ditawarkan atau dikampanyekan selama ini (mis. Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023a). Dengan demikian, hal ini menjadi bagian penting untuk memahami alasan ketidakpercayaan dan keraguan publik dapat muncul. Salah satunya ialah ketimpangan antara pandangan masyarakat dalam kehidupan keseharian dengan imaji kebijakan publik yang berdasarkan orientasi jangka panjang perekonomian, misalnya mengenai urbanisasi (Batubara dkk., 2023). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan filosofis dan kritis terhadap perubahan tata kelola dan redistribusi sosio-spasial dalam proses pembangunan IKN.

Dalam rangka mengurai permasalahan rencana pembangunan IKN dalam konteks wacana, konsep, dan pelbagai pendekatan ilmiah serta gaung opini publik, penelitian ini menggunakan pendekatan geografi kritis dan membangun konsep redistribusi sosio-spasial. Alasan utama pemilihan pendekatan tersebut diperkuat oleh reorientasi pendekatan ilmiah yang kritis dan filosofis dalam kerangka disiplin geografi kritis. Melalui pendekatan geografi kritis, diharapkan penelitian ini dapat menyelaraskan dengan berbagai laporan, seperti milik Badan Pusat Statistik (2023) terkait pembangunan sumber daya manusia serta orientasi atas capaian *SDGs* poin 11 (*Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan) serta 15 (*Life on Land*/Kehidupan di Daratan) tentang aspek-aspek penting, seperti perlindungan lingkungan, peningkatan infrastruktur, dan kualitas hidup manusia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan secara sistematis perubahan konsep IKN terus-menerus akibat peralihan tren paradigma pembangunan nasional yang terjadi berdasarkan perubahan kebijakan politik, latar belakang sosiokultural, dan ekonomi (Syaban & Appiah-Opoku, 2023).

Artikel ini menempatkan IKN sebagai objek material dalam penelitian. Reposisi *state of art* penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pembangunan IKN dengan menggunakan pendekatan geografi kritis dan filsafat. Fokus utama penelitian adalah lima titik kritis yang telah diidentifikasi: kapitalisasi wilayah, deforestasi,

degradasi ekologis, marginalisasi masyarakat adat, dan komodifikasi alam. Metode penelitian ini mencakup analisis kritis terhadap konflik konseptual antara visi pemerintah mengenai pembangunan kota dan pandangan berbagai kelompok masyarakat tentang keadilan ruang. Melalui pendekatan geografis kritis, penelitian ini akan memetakan masalah-masalah keruangan yang dihasilkan oleh pembangunan IKN dan menganalisis implikasinya terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan sistem ekologis di wilayah tersebut.

Beberapa hasil penelitian yang menjadi acuan utama penulis adalah sebagai berikut. Pertama, *The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities* yang diedit Lau, dkk., (2023) yang membedah proses perkembangan wacana IKN beserta tantangan dan peluangnya di masa depan. Hanya saja, bunga rampai ini belum menganalisis secara mendalam relasi wacana yang direproduksi dengan pengaruh konteks lanskap geografis. Hanya karya Meirina Ayumi Malamassam (2023) yang memiliki kedekatan objek analisis tentang redistribusi perpindahan penduduk dari kota lama ke IKN, sedangkan penelitian ini menganalisis wacana yang lebih luas terkait redistribusi sosio-spasial sebelum dan sesudah wacana IKN terbentuk. Artinya, dinamika objek analisisnya berbeda.

Kedua, karya yang diedit Warsilah, dkk. (2023) bertajuk *Assembling Nusantara: Mimicry, Friction, and Resonance in the New Capital Development* yang memberikan fondasi dan sumber primer dalam menganalisis proses redistribusi sosio-spasial. Warsilah, dkk. (2023) terbatas pada analisis yang sekedar mempertimbangkan praktik sosio-spasial dari IKN sebagai bahan implementasi visi urban dan referensi bagi ilmuwan sosial serta pemberi kebijakan. Orientasi tentang glorifikasi masa depan sangat kental dalam karya ini, seolah-olah IKN adalah solusi satu-satunya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebaliknya, penelitian ini mempertimbangkan dua ketegangan antara romantisme ataupun glorifikasi dari konsep IKN itu sendiri (Mahaswa & Hardiyanti, 2023), sebagaimana kritik atas tendensi tekno-nasionalisme semu yang berbahaya apabila tidak

ditelaah secara kritis dan mendalam (Amir, 2023). Selain itu, dalam konteks pendekatan objek formal, setidaknya terdapat dua penelitian di Indonesia yang pernah menggunakan pendekatan geografi kritis, yakni di bidang hukum (Nalle, 2021) dan tata kelola perkotaan di Indonesia (Hexagraha, 2018).

Adapun nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pada penekanan dimensi spasial subjektif yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Lefebvre (1991; 2014) dalam rangka menganalisis subjek sosial yang dipengaruhi dan memengaruhi kerja-kerja praktik spasial. Tubuh subjek dalam kerangka geografi kritis selalu diproduksi dan memproduksi pertukaran akan sesuatu baik terlihat maupun tersembunyi. Selanjutnya, analisis ruang tentang IKN sebagai term figuratif memiliki bentuk-bentuk atau pola-pola tertentu dalam memproduksi ‘makna’ dan menukarkan ‘ide/gagasan’ sehingga pandangan praktik-praktik tindakan sosial selalu bergantung kepadanya. Analisis ruang tersebut dapat ditempatkan dalam proses wacana tentang pembangunan IKN, yang secara langsung melibatkan aktor-aktor yang berperan sebagai pelaku aktif ataupun pasif. Representasi fisik dari pembangunan IKN dan kemampuan konseptual dari subjek sosial juga memengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan dan pengertian ruang pada pembangunan IKN. Tanpa konsep ruang ‘khusus’ yang dipahami secara kritis, tidak mungkin terdapat perbedaan yang signifikan, terutama ketika melacak akar produksi arus utama wacana tentang representasi pembangunan IKN baik secara sosial maupun institusional. Dengan demikian, analisis redistribusi sosio-spasial menjadi bagian inheren yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari praktik-praktik pemindahan ‘konsep’ di luar wilayah Kalimantan menuju bentuk IKN baru sebagai ruang berdimensi baru, serta praktek perwujudan konsepsi ‘ideal’ IKN. Padahal, sejauh ini terdapat ruang-ruang yang terlepas dari praktik keseharian pembangunan yang acapkali diabaikan atau dimarjinalkan.

Rumusan masalah penelitian ini, antara lain: (1) bagaimana perubahan dan dampak

dari redistribusi sosio-spasial yang terjadi di Kalimantan selama proses pembangunan IKN? (2) bagaimana peran geografi kritis sebagai kerangka epistemik dalam memahami redistribusi sosio-spasial yang terjadi di IKN? Penelitian ini berlandaskan studi pustaka (*literature review*) yang menekankan analisis filosofis yang dikategorisasikan ke dalam bentuk, klasifikasi, analisis, dan interpretasi data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, objektif, dan fundamental (Daly, 2015). Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat terkait dengan model pembangunan yang mengedepankan aspek ekologis dan keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosio-spasialitas IKN

Pada Agustus 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan rencana untuk memindahkan ibu kota baru, IKN Nusantara, ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan ruang baru bagi eksekusi proses pemerintahan. Pemindahan ruang pemerintahan bukanlah hal baru, sebagaimana telah terjadi sebelumnya di Malaysia dan Australia. Pemindahan kantor-kantor pemerintahan Malaysia ke Putrajaya dilakukan sebab Kuala Lumpur sering mengalami kemacetan yang berakibat kepada polusi udara (Rachmawati, dkk., 2021). Serupa dengan hal itu, salah satu alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara adalah keadaan Jakarta yang semakin tidak layak dihuni. Masalah lingkungan, termasuk polusi dan banjir, serta masalah transportasi berpotensi mengurangi produktivitas dan efisiensi masyarakat kota. Melalui kehadiran Nusantara, populasi Jakarta diharapkan dapat sedikit menurun sebesar dua juta jiwa sampai 2045.

Beberapa tahun berikutnya, IKN mengalami perubahan yang cepat (lih. Gambar 1). Kegiatan pemerintahan digadang akan mulai beroperasi di IKN pada pertengahan tahun 2024, dimulai dari pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN. Kegiatan seremonial upacara bendera pada 17 Agustus 2024 juga direncanakan akan dilaksanakan di istana kepresidenan yang baru.

Perkembangan ini masih minimal jika dilihat dari cetak biru IKN. Pembangunan IKN dibagi menjadi lima tahap dengan titik final direncanakan pada tahun 2045. Pada tahap pertama ini, fokus pembangunan masih terletak di penyediaan infrastruktur fisik (Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023a).

Pembangunan tersebut berlanjut kendati protes dan kritik mengenai imaji IKN itu sendiri tidak pernah berhenti. Kritik tersebut datang dari organisasi aktivis seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), politisi oposisi, dan masyarakat secara umum yang memiliki berbagai kekhawatiran mengenai masa depan IKN. Penulis berargumen bahwa, secara garis besar, titik permasalahan IKN muncul karena redistribusi sosio-spasial yang akan terjadi. Konsep sosio-spasial merujuk kepada aspek spasial dari relasi sosial. Konsep ini muncul dari upaya untuk mempertimbangkan suatu aspek yang jarang diperhatikan ketika membahas berbagai problem dalam masyarakat. *Spatial turn* dalam ilmu sosial dan humaniora terjadi beberapa dekade belakangan, utamanya sebab perkembangan sistem informasi geografis yang memungkinkan pendekatan analisis spasial baru (Warf & Arias, 2008).

Setiap ruang memiliki relasi sosial dan, sebaliknya, setiap relasi sosial tertanam dalam sebuah ruang yang turut memengaruhinya. Hal ini membuat masyarakat dan problemnya tidak dapat lepas dari ruang yang mendasari relasi sosial tersebut. Relasi sosial yang dibayangkan dalam tulisan ini tidak terbatas kepada relasi sosial antar manusia. Tanah, hewan, tumbuhan, virus, teknologi, dan lainnya turut membentuk konstitusi sebuah relasi sosial yang juga didasari ruang. Di dalam relasi sosial tersebut, perbedaan sosial dan relasi kuasa terbentuk (Panelli, 2010). Fenomena sosial semacam penyingkiran, peperangan, dan kenirtempatan juga terlihat di dalam relasi sosial yang tidak melibatkan manusia (Khazaa & Almiron, 2021; Johnson, 2015; Mamzer & Nowak, 2021).

Penulis berangkat dari titik pemahaman bahwa dalam suatu kondisi *status quo*, terdapat berbagai aspek sosio-spasial yang telah terdistribusi untuk tiap pihak, baik manusia

maupun lebih-dari-manusia. Akan tetapi, relasi sosio-spasial tidaklah tetap dan statis, melainkan berada dalam proses yang terus berlangsung. Dengan kata lain, setiap pihak dapat mendapat kelebihan di aspek tertentu sembari menerima kekurangan di aspek lain. Proses ini turut hadir dalam segala relasi sosial. Organisasi dan konfigurasi sosio-spasial antarpihak terus terorganisasi dan terkonfigurasi ulang.

Tulisan ini membingkai proyek pembangunan IKN sebagai salah satu relasi sosial yang mengakibatkan redistribusi sosio-spasial kepada pihak-pihak manusia dan nonmanusia. Antara lain, pihak-pihak yang terlibat dalam redistribusi sosio-spasial tersebut adalah pemerintah Indonesia, masyarakat adat, hewan dan tumbuhan setempat, serta berbagai entitas alam yang secara antroposentris sering disebut “sumber daya alam”. Kehadiran IKN di daerah Sepaku dan Semboja menggantikan kehadiran agen lain yang telah dahulu menghuni tempat tersebut. Bersama dengan itu, pemerintah Indonesia membawa representasi ruang baru berupa rencana KIKN dan KPIKN, Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dan UU IKN yang mereorganisasi sosio-spasial ruang tersebut. Ketegangan antara representasi ruang baru dengan praktik spasial yang telah ada menyebabkan setiap pihak harus merombak relasi mereka dengan ruang yang merepresentasikan diri mereka.

Kehadiran masyarakat adat yang penghidupan dan kediamannya terancam di rencana tata ruang IKN merupakan salah satu poin kritik yang sering disuarakan. Mengenai hal tersebut, kekhawatiran AMAN adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat partisipasi publik yang minimal dalam pembuatan kebijakan mengenai IKN. Hal ini terkesan bertentangan dengan klaim Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkali-kali bahwa dialog dengan masyarakat adat dilakukan. AMAN berargumen bahwa OIKN hanya berdialog dengan elit komunitas adat yang tidak mengadvokasikan kekhawatiran masyarakat lokal dan malah mengharap bagian dalam proyek IKN. Kedua, proyek IKN akan mengabaikan masalah lahan yang menjadi konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan yang mendapat jatah tanah. Salah satu isu IKN adalah penetapan lokasi ibu kota baru di

tanah-tanah yang dimiliki oleh kapitalis-oligarkis (Johansyah, dkk., 2019). Kegencaran pemerintah untuk mengundang investor mendukung tesis Satriani, Adaba, & Syafi'i (2023) bahwa proyek IKN terutama bertujuan menciptakan ruang investasi baru. Ketiga, kehadiran masyarakat non-lokal baru akan menimbulkan konflik lapangan pekerjaan dan tanah yang sebelumnya dibutuhkan untuk keperluan tradisi adat (Simandjuntak, Meschede, & Haug, 2023). Kelemahan suku setempat dalam hal pendidikan, ekonomi, dan penguasaan teknologi dibanding masyarakat baru akan lebih menyokong pihak kedua dibanding pertama (Warsilah, 2023). Ditambah, masyarakat lokal khawatir bahwa kehadiran masyarakat baru akan menyebabkan perubahan budaya dan “degradasi moral” (Simandjuntak, Meschede, & Haug, 2023).



Gambar 1. IKN pada April 2022 (kiri) dan Februari 2024 (kanan).

Sumber: NASA (<https://www.theatlantic.com/photo/2024/08/photos-nusantara-indonesia-new-capital-city/679457/>)

Masalah lahan mendapatkan sorotan. Bagi masyarakat adat yang kini tinggal sebelumnya menghuni lokasi pembangunan IKN, tanah tidak hanya dimaknai sebagai tempat mereka berpijak, tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Banyak orang menganggap tanah sebagai sesuatu yang sangat berkaitan dengan masa depan mereka. Kepemilikan terhadap tanah menjadi sesuatu yang sering diperjualbelikan dan ditabung hingga kebutuhan meningkat, seperti ketika anak sebuah keluarga akan mengemban pendidikan tinggi. Namun, kepemilikan tersebut bersifat ambigu. Tanah-tanah yang menjadi titik konflik antara pemerintah dan masyarakat adat adalah tanah yang secara *de jure* tidak, dan tidak boleh, ditempati. Akan tetapi, secara *de facto*, tanah-tanah tersebut selalu dihuni dan berelasi dengan pihak di tempat lain (Cahyadi, dkk., 2023). Hingga April 2024, masih terdapat 2.086 hektar tanah di dalam rencana kawasan IKN yang masih dihuni (Safitri, 2024).

Proyek pemindahan ibu kota itu sendiri sejatinya juga mengonfigurasi ulang proses

politis Indonesia. Kehadiran Jakarta sebagai ibu kota memiliki signifikansi sebagai ruang yang menaungi tensi dialektis antara rakyat dan pemerintah. Jakarta adalah daerah mega urban yang kosmopolitan—disebut pula “Indonesia mini”—yang di dalamnya manusia Indonesia dari berbagai penjuru hadir. Di jalanan Jakarta, berbagai aksi dan demonstrasi dalam sejarah dilaksanakan untuk menuntut redistribusi sosio-spasial tertentu. Namun, pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur akan menyebabkan pemerintah tidak lagi berbagi ruang dengan mikrokosmos Indonesia di Jakarta. Wilson (2023) menyebut proyek ini sebagai “re-spasialisasi ... tren menuju bentuk kekuasaan negara yang tidak dapat diakses.” Organisasi sipil yang telah terlebih dahulu mapan di Jakarta pun akan terpaksa mengeluarkan biaya logistik untuk beraktivitas di Nusantara.

Hasil dari tinjauan pustaka mengenai pembangunan IKN dengan 16 pemetaan utama direpresentasikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Tinjauan Pustaka Pembangunan IKN

No	Tema	Penulis	Analisis Hasil
1	Arsitektur	Rosyadi dkk. (2021); Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023b)	Setiap gedung dan menara di IKN diwajibkan memiliki 10 sistem: manajemen bangunan, komunikasi, sumber daya, keamanan, kontrol akses, pencahayaan, energi, mobilitas, keselamatan, dan HVAC; penekanan diberikan kepada teknologi terkait daripada aspek arsitektur tradisional lainnya. Beberapa bangunan memiliki “makna tersembunyi” di balik desainnya, seperti gedung istana negara baru yang melambangkan persatuan dalam keberagaman.
2	Lingkungan	Suryani dkk. (2023); Susmiyati dkk. (2023); Ramadhan dkk. (2022); Kurniadi (2019)	Imaji kota hutan IKN dapat berdampak positif kepada manajemen hutan; HGU dan IUP melewati 11 juta ha, padahal secara legal hanya boleh 3 juta ha; dalam UU IKN terdapat kontradiksi persentase area hijau yang harus direalisasikan (75% dan 50%); pembangunan IKN masih belum menyesuaikan konsep <i>forest governance</i> . IKN tetap rawan hujan ekstrem, banjir, longsor, El-Nino, dan kebakaran hutan pada bulan-bulan tertentu. Provinsi Kalimantan Selatan justru lebih minimal dari segi kebencanaan daripada Kalimantan Tengah.

No	Tema	Penulis	Analisis Hasil
3	Kebijakan Publik	Yanuar <i>dkk.</i> (2023); Tryatmoko & Kawamura (2023)	Secara historis, proyek relokasi ibukota sering mengalami diskontinuitas; kebijakan harus digencarkan. Pemerintahan sentralistik baru di IKN tidak terjustifikasi sebab komitmen Reformasi untuk meningkatkan otonomi lokal; ini akan mengakibatkan ketidakmampuan memecahkan masalah karena gerak aktor politis non-pemerintahan terbatas.
4	Komunikasi Publik	Takariani, Sari, & Dirgahayu (2023)	Komunikasi soal pembangunan IKN direkomendasikan menggunakan sosial media, bersifat akuntabel, dan secara konstan mengomunikasikan manfaat pembangunan IKN untuk menghalau kekhawatiran.
5	Masyarakat Adat	Cahyadi <i>dkk.</i> (2023); Nugroho (2022); Ripaldi <i>dkk.</i> (2022)	Proyek IKN memarjinalisasi masyarakat adat yang telah terlebih dahulu hidup dan dihidupi oleh alam di kawasan IKN. Penyertaan masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN harus substansial, tidak hanya prosedural. Organisasi non-pemerintah seperti keagamaan dapat ikut membantu ketahanan masyarakat adat.
6	Kapitalisasi dan Komodifikasi Alam	Nurjaman & Rusata (2023)	Konversi guna tanah akan membahayakan akses rakyat terhadap ruang penghidupan; diskursus <i>green urbanism</i> dan <i>forest city</i> malah mengabaikan masalah sosio-ekologis (misalnya konsesi lahan dan degradasi hutan) yang sudah ada di Kalimantan Timur.
7	Pergeseran Budaya	Simatupang & Pangaribuan (2023); Fauzi <i>dkk.</i> (2023)	Perpindahan <i>urbanites</i> ke IKN akan menyebabkan berdampak kepada resepsi budaya masing-masing; penyesuaian <i>cross-cultural</i> perlu dilakukan dalam tempo yg sesingkat-singkatnya jika ingin memaksimalkan kerja pemerintahan. Membangun kesadaran (<i>awareness</i>) masyarakat adat IKN terhadap pentingnya menjaga warisan budaya mereka sendiri.
8	Hukum	Kamal <i>dkk.</i> (2022)	Dokumen hukum IKN tidak sesuai prinsip legislasi dalam hal: ketidaklengkapan materi studi dan ambiguitas motivasi di baliknya; ketidakrealistisan implementasi; dan ketiadaan jaminan bagi rakyat yang dirugikan.
9	Ekonomi	Kusumarani & Parlina (2023); Satriani, Adaba, & Syafi'i. (2023); Akhmadi & Himawan (2021)	Skema pembiayaan (APBN dan investasi) IKN terbatas, tetapi <i>crowd funding</i> tidak punya justifikasi legal. Regulasi, rancangan tata ruang, dan proses pembangunan IKN dideteksi bersifat kapitalis; IKN dapat diinterpretasikan sebagai proyek murni untuk menghasilkan ruang investasi baru.
10	Sosial	Wilson (2023); Simandjuntak, David Meschede, & Haug (2023)	Pemindahan ibukota akan mengurangi tensi dialektis antara pemerintah dan rakyat di Jakarta. Iklim masyarakat IKN baru akan penuh konflik antara masyarakat lama dengan masyarakat baru akibat kebudayaan berbeda dan kecemburuan sosial.

No	Tema	Penulis	Analisis Hasil
11	Demografi	Malamassam (2023); Warsilah (2023)	Pemindahan keluarga ASN dan individu berkemampuan non-ASN lainnya menjadi tantangan. Migrasi ke IKN akan menyebabkan marjinalisasi masyarakat adat sebab kesempatan masyarakat adat cenderung lebih rendah karena kalah di bidang pendidikan dan penguasaan teknologi.
12	Tata Ruang	Adrianto & Berta (2023); Widodo (2023); Nasution (2023); Basuki (2023); Obermayr <i>dkk.</i> (2023)	Faktor yang membuat Jakarta tidak dapat dihuni semakin intens seiring waktu. Selalu terdapat gap antara kebijakan tata ruang dengan pembangunan di lapangan; cakupan kebijakan untuk daerah urban dan peri-urban timpang; pertumbuhan urban sulit dikontrol. Terdapat ketidakadilan antargenerasi dalam rencana IKN karena IKN terkesan mengutamakan elit tua dibanding generasi muda kini. Narasi rencana tata ruang mengonstruksikan realitas yang tidak konsisten satu dengan yang lain; identitas kota adalah identitas spasial, tidak dapat disamakan dengan identitas yang dibangun hanya dari retorika dan slogan.
13	Keseharian	Ardhana & Ariyanti (2023)	Aspek religius, spiritual, dan hal subtil lainnya dalam keseharian masyarakat menambah lapisan dari kapital sosiokultural masyarakat “asli”; boleh jadi diperlukan usaha artifisial untuk memodifikasi budaya <i>tangible</i> dan <i>intangible</i> (menjadikan berbagai aspek keseharian menjadi “kebudayaan” dan “<i>local wisdom</i>”).
14	Pertahanan dan Ketahanan	Sinaga & Khanisa (2023); Rahman, Noor, & Kosandi (2023)	Rekomendasi: pemerintah lebih memperhatikan pertahanan dan keamanan maritim di sekitar IKN; eksplorasi lebih lanjut pengembangan kelautan IKN. Kebijakan pertahanan pemerintah di Laut Natuna dan Laut Sulu-Celebes menjadikan risiko untuk IKN di masa depan; Koordinasi tiga arah negara-bisnis-masyarakat kurang.
15	Persepsi Publik	Kusumarani, Firdausy, & Rachmat (2023); Lestari, Mupaat, & Erfina (2022); Rohid & Sukisno (2022); Kodir <i>dkk.</i> (2021)	Fasilitas yang muncul dalam aspirasi rakyat terbanyak: area desain spesial (mis. utk olahraga, pengembangan komunitas), higiene dan keamanan, fasilitas pejalan kaki. Maret 2022, analisis sentimen Twitter thd IKN menunjukkan 1.141 komentar positif, 591 negatif; sama halnya di YouTube, 90,4% setuju; sedangkan 2021 mayoritas penduduk setempat tidak setuju.
16	Teknologi	Muttaqin & Pusvita (2023); Setiawan, Nugroho, & Hamjen (2023)	<i>Smart city</i> atau kota pintar IKN menuntut edukasi masyarakat untuk berinteraksi dengan infrastruktur dan teknologi lainnya; penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di IKN membutuhkan kehadiran ahli data dari berbagai institusi untuk ikut andil dalam mengoperasikan sistem.

Sumber: Olahan data penulis.

Secara garis besar, keenam belas tema utama ini akan dianalisis di subbab berikutnya dengan cara mencari titik temu dari saling-silang wacana yang hadir dan berkembang. Hasil analisis tinjauan pustaka telah melalui proses triangulasi dan reduksi data berdasarkan poin-poin utama objek formal yang tersedia pada konsep utama geografi kritis sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Tabel 2 di subbab selanjutnya.

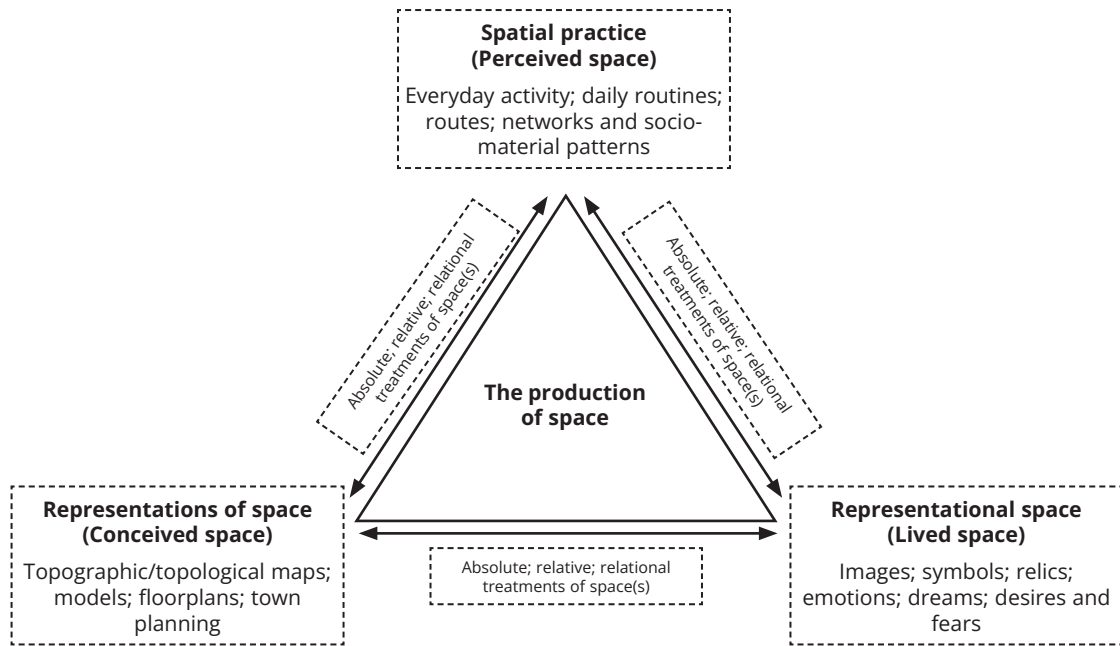
Selayang Pandang Wacana Geografi Kritis

Geografi kritis (*critical geography*) atau dikenal pula sebagai sub-pendekatan *critical human geography* merupakan pendekatan geografi kontemporer yang tidak hanya menekankan analisis kritis dan mendalam atas suatu permasalahan geografis tertentu, tetapi juga menjadi semacam gerakan akademisi baru di berbagai lintas disiplin keilmuan. Term *kritis* dalam *geografi kritis* memiliki makna yang kompleks dan mendalam, terutama terkait dengan teori sosial progresif yang menghubungkan berbagai kajian non-geografi (politik, ekonomi, ekologi, dan filsafat) untuk memahami relasi dalam *boundary objects* antara ruang geografi dan manusia yang menghidupinya (Lees & Demeritt, 2023). Menurut Susan Mayhew (2015), geografi kritis menjadi payung bagi kelompok pendekatan geografi yang memusatkan kajian geografis kepada pendekatan politik, kekuasaan, dan dominasi produksi maupun reproduksi suatu gagasan atau konsep tentang lanskap, ruang, tempat, dan wilayah.

Gelombang pertama gerakan geografi kritis lahir sekitar tahun 1960-an, yang diawali oleh para geografer radikal yang memiliki komitmen kuat dalam politik emansipatoris, perubahan sosial progresif, dan perluasan ragam teori sosial. Selanjutnya, sekitar tahun 1990-an, gerakan geografi kritis semakin diperluas dengan pengintegrasian pandangan pascamodernis, feminis, dan Marxis yang secara spesifik membahas tentang perlawanan atas dominasi institusi geografi di Inggris yang mendukung

berbagai perusahaan tambang. Gelombang terakhir dari geografi kritis lahir kembali pada abad ke-21 dengan fokus analisis kepada praksis perubahan sosial dan politik yang terjadi akibat kolonialisme, eksploitasi, kerusakan lingkungan, dan neoliberalisasi institusi geografi (Lees & Demeritt, 2023). Blomley (2008) secara tegas juga turut mengkritik para geografer yang hanya mengikuti arus, patuh kepada institusi yang mempertahankan *status quo*, menerima begitu saja (*taking-for-granted*) realitas yang sebenarnya tidak pernah adil secara struktural dan spasial, seperti pembangunan yang tidak merata. Sayangnya, geografi kritis masih disibukkan dengan posisi relasi subjek para geografer dalam memproduksi ilmu, atau hanya berhenti pada sekadar pemetaan semu atas ketimpangan sosial dan marjinalisasi kelas minoritas tertentu.

Secara sederhana, bentuk pendekatan geografi kritis secara umum adalah mengkritisi ulang berbagai bentuk perubahan relasi, sistem, dan struktur yang terbentuk atas dasar eksploitasi kapitalisme, penindasan sepihak, imperialisme, kolonialisme, dan kerusakan lingkungan (Gregory dkk., 2011). Ia juga menekankan representasi ruang yang berfungsi sebagai bentuk dominasi atau perlawanan serta mempertahankan suatu kekuasaan tertentu (Castree & Wright, 2005). Geografi kritis juga melibatkan praktik keseharian (*everyday practices*) dari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, tindak-tutur, serta pemikiran yang menubuh dengan tempat dan lanskap tertentu yang di dalamnya terdapat hal-hal yang terabaikan untuk dianalisis seperti ketimpangan sosial atau kemiskinan (Cresswell, 2013). Sebagaimana dipaparkan dalam Gambar 2 tentang teori produksi ruang, ketidakadilan spasial tidak dapat terlepas dari berbagai praktik kepentingan, imaji ruang warga Kalimantan, serta representasi ruang pengambil kebijakan yang berjarak dari praktik spasial dan ruang representasional Kalimantan. Berbagai bentuk tersebut perlu dijustifikasi secara mendalam dan kritis alih-alih diterima begitu saja dan diarusutamakan.



Gambar 2. Teori Produksi Ruang

Sumber: Holmes, Fernandes, & Palo, 2021; Schmid, 2022

Secara umum, pendekatan geografi kritis yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan IKN adalah teori ruang dan lanskap dalam konteks kritik kehidupan keseharian (*Critique of Everyday Life*) oleh Henri Lefebvre (2014), pendekatan geografi kritis-filosofis dalam konteks ruang kapital oleh David Harvey (2001, 2019), dan konsep *spatial turn* oleh Edward Soja (2011). Berdasarkan beberapa pandangan arus utama dalam geografi kritis, redistribusi sosio-spasial merupakan bentuk dari pendekatan metodis yang dirumuskan oleh peneliti untuk mencari akar permasalahan wacana pembangunan IKN secara mendalam. Diawali dengan membedah konsep ruang geografis yang terbentang dalam tiga bentuk menurut Harvey (2001), yaitu: (1) ruang absolut (*absolute space*) yang terdiri dari ruang secara tetap (*fixed*), memiliki batas teritorial yang jelas, seperti wilayah administrasi

dan properti privat; (2) ruang relatif (*relative space*) yang memosisikan suatu hal baik konsep maupun wacana yang bergantung kepada spasial-temporal (ruang-waktu) dari sudut pandang sang pengamat (pemerintah, warga negara, warga adat, orang asing, dsb.); serta (3) ruang relasional (*relational space*) yang merupakan hasil produksi spasial-temporalitas melalui suatu proses yang saling berdialektika satu dengan lainnya. Proses dialektis ketiga ruang inilah yang perlu dipahami untuk mengkonsepsikan bahwa bentuk wacana pembangunan IKN menjadi semakin rumit dan kompleks. Kompleksitas inilah yang dapat dianalisis melalui pemetaan redistribusi sosio-spasial secara filosofis dan kritis. Adapun gagasan sosio-spasial dalam kerangka geografi kritis dapat dibedakan menjadi beberapa konsep utama seperti yang telah digambarkan pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Konsep Sosio-spasial Geografi Kritis

No	Tema	Penulis	Konsep
1	Sumber Daya Alam (<i>Energy</i>)	Harvey (2018;1982)	Nilai guna yang terkandung dalam suatu lahan dapat diekstraksi sebagai kapital (seperti mineral), dimobilisasi dalam sebuah proses produksi kapital sebagai tenaga alam (seperti tenaga angin dan air) atau digunakan sebagai sebuah reproduksi kapital berkelanjutan (seperti pertanian dan perhutanan) (hal. 334).

No	Tema	Penulis	Konsep
2	Sumber Daya Manusia (<i>Human Capital</i>)	Smith (2008)	<i>Seesaw of Capital</i> : Kapital dapat mempengaruhi kemajuan satu masyarakat di suatu wilayah, namun dari kemajuan itu mengakibatkan keuntungan yang dimiliki oleh tanah itu menurun. Maka, mereka berpindah ke wilayah yang memiliki masyarakat berkembang hingga mereka memiliki kemajuan dan kembali pindah ke wilayah yang sebelumnya mereka tinggalkan karena masyarakatnya telah mundur (hal. 197-198).
3	Pembangunan	Virilio, Lotringer & Taormina (2001); Willis (2014)	Virilio mengalihkan pembahasan topologi ke tele-topologi, pemetaan sebuah proses dalam ruang yang secara bertahap melipat ke dalam dirinya sendiri karena efek kecepatan telekomunikasi yang merubah wilayah-wilayah lokal menjadi perkotaan, dimana arsitekturnya didefinisikan oleh teknik komunikasi daripada teknik konstruksi (hal. 34) Konsep “Pembangunan” dengan p-kapital diinterpretasikan sebagai intervensi neokolonial (hal. 584); Global South hanya dianggap situs pembangunan (hal. 585); kebijakan pembangunan neolib merefleksikan sebuah “imajiner sosio-spasial kontinu” yang di dalamnya dunia dianggap telah mengalami alur pembangunan linier (hal. 592)
4	Kesetaraan	McDowell (1999)	Seperti gagasan tentang gender, tempat-tempat sebagai ruang-ruang yang dibatasi secara teritorial pada skala spasial yang beragam juga merupakan sebuah konstruksi sosial (hal. 31)
5	Kekuasaan	Keith & Pile (2013); Amoore (2014)	Wilayah selalu didefinisikan secara subjektif oleh subjek yang memiliki kekuasaan dimana pada prosesnya selalu mengabaikan masyarakat sipil selaku subjek sebenarnya yang memberikan identitas terhadap wilayah tersebut (hal. 282) Kekuasaan memiliki aspek spasial (emergen dan material) (hal. 581); pemetaan terhadap situs kekuasaan memungkinkan resistensi melalui relokasi resistensi ke situs yang sama (hal. 582)
6	Ruang	Soja (1996)	<i>Thirdspace</i> : Ruang dimana setiap tempat dapat dilihat melalui pelbagai sudut pandang; masing-masing terlihat jelas; tetapi juga penuh dengan rahasia dan dugaan, penuh dengan ilusi dan kiasan, sebuah ruang yang lazim bagi kita semua namun tidak dapat sepenuhnya dilihat dan dipahami (hal. 56)
7	Ekonomi	Pavlovskaya, M & St. Martin (2014)	Konsep ekonomi menurut Mitchell: Ekonomi modern adalah konstruksi ilmu ekonomi; ekonomi dipahami sebagai varietas situs atau asemblase proses, praktik, dan aktor yang memungkinkan produksi dan distribusi barang dan jasa (hal. 471).
8	Budaya	Jackson (1989); Cresswell (1996); Seamon (1979); Price (2014)	Budaya dapat diproduksi dan direproduksi melalui praktik sosial aktual yang terjadi dalam konteks yang bergantung pada sejarah dan geografi secara spesifik (hal. 23) Lanskap hegemonik merupakan lanskap yang tidak pernah statis dan tetap, namun setiap menitnya selalu berubah akibat adanya perjuangan terus-menerus antara kelompok budaya dominan dan subordinat (hal. 57)

No	Tema	Penulis	Konsep
			Untuk memahami lanskap geografis, kita perlu menggunakan pendekatan fenomenologis yang melihat hubungan interpenetrasi antara manusia dan lingkungannya secara lebih jauh. Hubungan interpenetrasi ini sulit untuk diukur karena dia mengalir secara reflektif melewati tubuh dan perasaan kita. Meskipun demikian, ini perlu dipertimbangkan karena hubungan ini membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dan meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan yang kita tinggali (ch. 21) Budaya diposisikan sebagai medium afektif yang hadir dalam kontak antaraktor (hal. 514-5); budaya menurut Price tidak dapat dideskripsikan secara spasial karena bersifat abstrak (hal. 515)
9	Perkotaan	Harvey (2012)	Hak atas kota dibentuk dengan membangun kontrol demokratis atas penyebaran surplus/nilai lebih melalui urbanisasi (hal. 23)
9	Psikologi	Tuan (1979)	Lanskap ketakutan merupakan manifestasi dari hubungan mahahadir antara kekacauan alam dan manusia. Manusia selalu dihantui oleh rasa cemas terhadap ketidakpastian alam. Meskipun mereka sudah membentuk ulang alam sedemikian rupa, kekacauan tetap melekat di dalamnya (hal. 6)
10	Bahasa	Cosgrove (1998); McGeachan & Philo (2014)	Lanskap merupakan sebuah cara pandang manusia terhadap sebuah wilayah dengan asumsi ideologis yang secara mendasar tidak berubah (hal. 38) Relasi bahasa dengan realitas menurut Foucault terwujud secara riil, entah melalui media apapun bahasa disampaikan; Kata-kata mampu membentuk dan merusak kehidupan dan lanskap material (hal. 546); geografi menggunakan kata-kata untuk ikut merepresentasikan realitas dan kekuasaan yang mengintervensinya (hal. 563).
11	Demografi	Graham (2014)	Demografi dalam hubungannya dengan geografi manusia adalah mempertanyakan dua hal, yakni transisi kehidupan serta kelahiran dan kematian dari segi spasialnya (hal. 650); Namun, kerangka teoritis kajian demografi kini masih belum menjangkau teoritisasi produksi populasi yang diimajinasikan (hal. 675)
12	Lingkungan	Moore (2015); Nightingale (2014)	<i>World-ecology</i>: cara untuk membaca kembali keragaman pengalaman manusia modern sebagai hal yang tidak dapat dihindari, tidak dapat direduksi, dan bersifat sosio-ekologis sebagai sebuah kerangka untuk menyatukan produksi alam, perburuan kuasa, dan akumulasi modal (hal. 292) Term alam-masyarakat menyatukan permasalahan keadilan sosial, interseksionalitas, kekuasaan, dan politik dengan permasalahan perubahan iklim dan isu lingkungan lainnya (hal. 138)

No	Tema	Penulis	Konsep
13	Politik	Featherstone (2014)	Geografi manusia dan geografi kritis berkenaan dengan konsep politik dalam hubungannya dengan keruangan dan medan kontestasi (hal. 524); contoh permasalahan adalah subalternitas yang didasari politik spasial (hal. 530); relasi spasio-temporal dapat berada dalam ketimpangan sehingga identifikasi yang-politis dapat berbeda, hingga berimplikasi kepada trajektori politik setiap masyarakat (hal. 540).
14	Moral	Smith (2000); Olson (2014)	Perspektif moral yang mungkin diadopsi oleh interpretasi geografis menunjukkan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam dunia kreasi manusia. Misalnya, kepekaan geografis dapat membantu penyelesaian permasalahan normatif dalam bidang pembangunan (hal. 20) Etika mendorong geografi untuk menghasilkan norma t/ivitas dalam pembangunan teori; fokus Olson terhadap penderitaan, misalnya, membantunya menghasilkan pendekatan teoretis yang bersifat normatif dan aktivis (hal. 423-4); geografer dapat menggunakan bahasa untuk menciptakan <i>proximity</i> ketika merepresentasikan sebuah problem (hal. 440)
15	Lebih-dari-manusia	Greenhough (2014)	Berangkat dari pascahumanisme, geografi mulai mempertimbangkan nonmanusia dan manusia sebagai tubuh yang saling berelasi dengan dunia (hal. 94-95); geografi lebih-dari-manusia memperhatikan dunia dan fenomena sebagai hasil relasi sosio-material antara berbagai entitas.

Sumber: Data Olahan Penulis, 2024.

Di sisi lain, pemetaan ini dapat dimulai dengan mencari akar ketegangan dialektis (*dialectical tension*) yang terbentuk mulai dari kalangan dunia akademisi, politis, dan pandangan masyarakat secara umum (Blomley, 2008). Pemetaan ini dapat dibagi menjadi tiga indikator utama. Pertama, produksi pengetahuan yang dihasilkan oleh peneliti, pengambil kebijakan publik, dan pemerintahan daerah secara umum di mana mereka memiliki aturan main (*rule of the game*) tertentu dalam memproduksi pengetahuan dan wacana pembangunan IKN itu sendiri. Kedua, komunikator sains, publik figur berpengaruh, dan penyair (*wordsmiths*) yang tergolong menjadi perantara wacana publik atas pemahaman umum tentang lanskap pembangunan IKN yang terbentuk. Ketiga, industri penerbitan, media massa, serta sosial media menjadi ruang bebas yang mendorong adanya keragaman wacana yang berkembang baik secara netral, pro, dan kontra. Dengan demikian, pelbagai pendekatan yang ditawarkan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang

ketimpangan yang terjadi baik secara konseptual, praktik, dan wacana yang sedang berkembang dalam rangka pembangunan IKN di masa depan.

Refleksi Kritis dan Analisis Sosio-spasial

Hasil analisis konsep dan pembahasan penelitian ini menunjukkan setidaknya satu pola yang dapat kita lihat dan amati saat ini. Pola tersebut adalah materialisasi atas ide tentang 'Ibu Kota Nusantara' dari berbagai preseden baik yang dimiliki oleh pemerintah, peneliti, dan masyarakat umum terhadap wacana pembangunan IKN. Sebagaimana Kusumawijaya (2023) merangkum perkembangan kota-kota di Indonesia yang tidak pernah terlepas dari dinamika yang terbangun di kota-kota baik pada masa lalu, kini, dan depan. Hal yang menarik ialah bahwa kota bersifat organik yang artinya semua hal saling terhubung, menopang, dan membentuk sebuah tempat yang di dalamnya terdapat ruang untuk kehidupan banyak kepentingan. Tempat tersebut lantas kita sebut sebuah kota. Kota tidak hanya

menjadi ruang huni bagi sebagian besar manusia di dalamnya, melainkan juga menjadi ruang yang memediasi segala bentuk ekstraksi dan eksploitasi sumber daya.

Tempat tinggal paling menentukan identitas kita di antara lingkungan fisik lain. Kita bahkan dapat melihat tempat tinggal sebagai faktor pembentuk identitas yang lebih fundamental daripada hubungan sosial sebab “melalui tempat tinggal (*dwelling*), rasa memiliki di suatu tempat, hubungan manusia muncul” (Berleant, 2005). Tempat tinggal tidak hanya merujuk kepada kamar dan rumah, melainkan lebih luas dalam skala, yaitu desa dan kota. Tempat tinggal merujuk kepada tempat yang di dalamnya kita menghabiskan waktu terbanyak. Di sisi lain, persoalan hunian/rumah/tempat tinggal menjadi salah satu kajian yang menarik dalam kerangka geografi kritis di mana rumah menjadi salah satu kanon geografi. Rumah sebagai sebuah ruang otentik bagi setiap penghuninya ketika mengalami suatu proses rasa kepemilikan (*sense of belonging*) akan ‘sesuatu’ hal yang disebut sebagai ‘tempat’, termasuk mengubah dunianya (Moore, 2000). Secara reflektif, pembangunan IKN dapat memunculkan pertanyaan, “‘Rumah bagi dan untuk siapa?’” IKN mengklaim dirinya di masa depan sebagai ‘Kota Dunia Untuk Semua’. Tentu saja, slogan ini sangat umum dan terkesan ambigu. Justru ambiguitas inilah yang menjadi titik pijak analisis kritis dan filosofis bagi teori geografi kritis tentang ‘rumah’ sebagai ide yang menghubungkan (*nexus*) antara tempat tinggal, kekuasaan, dan identitas yang terbentuk secara imajinatif-material, dan juga rumah bersifat *multi-scalar* bagi banyak hal (Blunt & Dowling, 2006). Oleh karena itu, rumah di dalam kota menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari aspek politis—ruang vital yang dipengaruhi oleh mikro-geografi sosial dan ketidakpastian spasial tertentu, sehingga kemungkinan adanya ketidakadilan struktural dapat terjadi ketika proses pembangunan kota tidak memperhatikan kerja-kerja politis di dalamnya.

Masih seputar pemaknaan ruang hidup, Wilson & Peters (2005) menelusuri ide bahwa migrasi dan mobilisasi kependudukan juga melibatkan kolektivitas atas identitas-identitas

tertentu yang direproduksi di dalam suatu kota, atau yang sering disebut sebagai proses penolakan spasial tertentu. Penolakan di sini artinya terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan nilai-nilai tertentu yang dipahami, diyakini, juga dipercaya untuk dihidupi dan diperjuangkan oleh kelas sosial tertentu. Menariknya kajian pembangunan IKN yang dapat dianalisis melalui kerangka distribusi sosio-spasial ini menjadi pengingat bagi para pemegang kebijakan publik bahwa terjadinya proses urbanisasi suatu wilayah acapkali mengabaikan kritisisme dan rasionalitas pendirian suatu kota yang terbangun secara historis, bukan sebaliknya. Namun, wacana proyek pembangunan yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional, mega proyek dengan kriteria kawasan ekonomi khusus menjadikan bentuk pembangunan yang paling ambisius tanpa mempertimbangkan rekonfigurasi pengetahuan dan pengalaman di level kelas sosial ‘akar rumput’.

Rekonfigurasi yang terjadi dalam level sosial tersebutlah yang memunculkan resistensi terhadap sosio-spasialitas yang ingin dipaksakan di IKN. Selain akibat ketidakadilan dalam hal deliberasi dan kompensasi penggusuran, pengalaman dan pengetahuan yang berada di dalam penduduk asli yang merasakan relokasi juga menghasilkan kegelisahan yang berujung reaksi ambivalen terhadap proyek pembangunan ibu kota baru. Resistensi negatif yang kuat terutama datang dari kelompok yang secara langsung terdampak dan memutuskan untuk menolak pemindahan paksa sebab terdapat dukungan atau tiada tempat lain yang dapat ditinggali (JATAM, 2023, hlm. 77). Jika pun, pada akhirnya, kelompok ini bersedia untuk pindah dari konsentris terdalam IKN menuju sisi luar, masih terdapat kekhawatiran akan ketidakadilan epistemik terkait kesempatan untuk mengetahui lebih dalam rangka aktualisasi diri atau sekadar menemukan gerbang baru menuju partisipasi ekonomi.

Gencarnya ide pembangunan IKN, yang diklaim sebagai kota inklusif dan menjadi pertimbangan sebagai pembangunan yang Indonesia-sentris, justru acapkali membuat masyarakat aslinya merasa disingkirkan dari tanah kelahiran mereka. Ketidaksiapan proses

perpindahan dari masyarakat asli atas tekanan dari pihak berkepentingan yang mengakibatkan konflik tak terhindarkan. Bagi sebagian warga di wilayah Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara merasakan dampaknya secara langsung. Perasaan yang terasingkan dan terpinggirkan selalu menghantui mereka. Sebaliknya, wilayah konsentris terluar justru mendukung pembangunan IKN—mereka percaya keuntungan ekonomi lebih banyak mereka dapatkan di masa depan. Fenomena ‘disparitas’ antara pusat IKN, wilayah konsentris dalam, tengah, dan terluar menunjukkan rendahnya keterlibatan pertimbangan masyarakat secara terbuka dan deliberatif, pembangunan ini seharusnya secara bertahap, berhati-hati, dengan harapan mampu meminimalisir konflik kepentingan.

Selain itu, terdapat semacam ketidakpercayaan masyarakat terdampak atas masa depan proyek IKN ini. Tentunya, media massa menangkap pernyataan Presiden sampai Kepala Otorita IKN dalam bentuk optimisme sebagai proyek yang berbuah manis di masa depan, setidaknya di tahun 2045. Sayangnya, pada level akar-rumput sampai pusat, masih saja terdampak intrik-intrik politik yang bertendensi pada korupsi. Mereka, masyarakat terdampak, lebih mengkhawatirkan adanya bentuk-bentuk kejahatan terstruktur dan masif, seperti korupsi, konflik pertanahan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai tindakan represif yang terjadi terhadap warga nantinya. Apalagi, ketika IKN tidak dibangun sesuai dengan cara berpikir ‘alam’ Kalimantan Timur. Selama ini, secara realistis, pembangunan IKN telah mengorbankan banyak kerugian di level sosial, budaya, dan ekologis. Harapan mereka kemudian memastikan bagaimana IKN tidak lagi menjadi mega proyek yang korup dan mangkrak, dan menjadikannya sebagai bentuk percontohan pembangunan kota-kota yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia.

Permasalahan pembangunan IKN dapat direfleksikan bahwa logika ideal yang utopis ketika merujuk pada desain-desain kota tumbuh dan megah tetapi sayangnya luput akan pijakan dasar dari lanskap sebelumnya yang bergerak secara organik serta natural. Pemikiran ‘babat alas’ atau

semacam deforestasi dengan dalih: pembukaan hutan seluas-luasnya untuk kepentingan banyak orang juga perlu untuk dipertimbangkan secara matang. Sebagaimana kondisi fisiografis titik IKN yang digadang-gadang menjadi representasi dari ‘pusat’ Indonesia juga menjadi bentuk ambiguitas baru dalam pola redistribusi sosio-spasial yang terbangun.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 1 yang memuat setidaknya beberapa tinjauan pustaka tentang Pembangunan IKN dan Tabel 2 berdasarkan beberapa konsep kunci dalam membahas redistribusi sosio-spasial, berikut beberapa poin utama dari hasil refleksi kritis dan analisis sosio-spasial antara lain:

Pertama, sejak tahun 2022 sampai 2024 perubahan lanskap geografis wilayah IKN berubah sangat signifikan. Peningkatan deforestasi merupakan konsekuensi dari setiap pembangunan yang melibatkan biaya ekologis tertentu. Analisis redistribusi sosio-spasial ini muncul ketika tata rencana utama dari sebuah pembangunan diimplementasikan dari replikasi dan representasi imaji dari ‘pusat’ yang notabene Jakarta-sentris. Sentralisasi kebijakan sudah melekat dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama selama rezim Orde Baru. Barulah ide-ide tentang desentralisasi dilahirkan pasca-Reformasi, termasuk realisasi pembangunan IKN. Sayangnya, ide desentralisasi ini hanya berhenti pada pemilihan wilayah yang lebih strategis untuk memindahkan Ibu Kota lama di Jakarta menuju Ibu Kota baru Nusantara di Kalimantan, alih-alih mempertimbangkan bagaimana perubahan corak gagasan asli (adat keseharian) di Kalimantan terjadi. Tentu saja, pemilihan teknokrasi atas berbagai pertimbangan analisis strategis terpusat karena lebih dianggap terbukti dalam proses pembangunan Ibu Kota Lama. Peredaran wacana kontra IKN lahir dari ketidakpastian yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, sebaliknya wacana pro IKN justru lebih banyak muncul dari kalangan politisi pendukung pemerintahan (lih. *Investigasi Tempo* pada 2023 tentang maladministrasi IKN; *Opini Kompas* (2022-2024); jurnalis independen *Project Multatuli*; alih wahana riset dari *The Conversation Indonesia* dengan tajuk pemindahan ibu kota,

dan BBC News Indonesia). Hal ini dikarenakan ada hal-hal yang dianggap belum selesai dalam pembangunan Ibu Kota Lama di Jakarta, semisal sistem transportasi yang layak, hunian yang sehat, ruang publik yang aman, dan tempat industri yang lebih terjamin. Sedangkan, ada secercah harapan itulah yang selalu didistribusikan dan berusaha direproduksi sebagai ‘wacana’ dalam berbagai bentuk, baik promosi, sosialisasi, sampai penelitian berorientasi IKN, termasuk ide tentang melahirkan sistem otonomi daerah yang lebih baik, peningkatan perekonomian, dan pemerataan pembangunan.

Redistribusi sosio-spasial tidak melulu berbentuk fisik-material dalam bentuk keruangan seperti kota atau rumah, melainkan dapat berbentuk ‘kata’ atau ‘wacana’ yang dilahirkan dan direproduksi secara terus menerus. Ujung tombak dari pembangunan IKN ialah kesepakatan bersama dari berbagai pihak termasuk *stakeholders* di dalamnya. Oleh sebab itu, pembentukan konsep yang bermakna futuristik, ramah lingkungan, dan keragaman menjadi pemilihan dari pola komunikasi publik yang paling tepat.

Kedua, pembangunan IKN menjadi bentuk dari representasi kebijakan tekno-nasionalis yang mengedepankan beragam simbol-simbol kebhinekaan, garuda, Pancasila, pluralisme, kota dunia, serta berbagai semboyan yang berupaya sebagai pusat peradaban baru Indonesia Emas 2045 di masa depan. Kalimantan di saat yang bersamaan menjadi semacam *Terra Incognita* (Wilayah Tak Pernah Terjamah dan Tak Pernah Diketahui) yang dengan sesuka hati siapapun dapat memasukan ‘simbol’ atau ‘penanda’ tertentu atas wilayah tersebut yang terkesan ahistoris. Padahal, Kalimantan di masa lalu memiliki kompleksitas sejarah alam dan manusia. Analisis redistribusi sosio-spasial menunjukkan bahwa adanya ‘kekuasaan negara’ dalam mengontrol tata kelola ruang. Basis ideologi pembangunan mendorong perubahan alam yang harus digantikan oleh budaya baru yang selalu didistribusikan dan direproduksi dari pengetahuan idealis ‘pusat’ ke wilayah baru ini. Meskipun, dengan berbagai upacara simbolis tentang ‘keberagaman’ namun kenyataannya dominasi universal yang tunggal

masih sangat dimungkinkan karena adanya ketimpangan pemaknaan ruang dari pemerintah daerah dan pusat yang saling menghubungkan perbedaan kepentingan serta masyarakat yang termarginalkan oleh karena masuknya proses mobilitas kependudukan baru yang sangat urbanis. Artinya, *terrae incognitae* atau *terra incognita* ini tidak terlepas dari hubungan antara interaksi imajinatif dan perspektif atas persepsi ‘politik’ tertentu yang membentuk sekaligus merepresentasikan bagaimana seseorang memahami suatu wilayah geografis tertentu (geosofi) yang selalu berbasis pada konteks pengetahuan sebelumnya. Pada konteks ini, terdapat redistribusi pengetahuan epistemik antara pusat dan daerah, kota dan desa, urban dan hutan, masa lalu dan masa depan, perlawanan dan *status quo*, kemapanan dan ketimpangan, dan sebagainya bahkan termasuk pengalaman keseharian yang jarang terjamah.

Ketiga, alam sebagai komoditas baru bagi pemerintah. Kekuatan dari pembangunan IKN adalah meromantisasi sekaligus mengglorifikasi keindahan dari alam hutan Kalimantan. Suatu ruang spasial yang akan dibentuk dengan cara memenuhi berbagai kelemahan ekspektasi kota masa lalu terutama pada aspek kesehatan lingkungan. Berbagai kemudahan investasi baik dari dalam maupun luar negeri menjadi kebijakan otoritas IKN saat ini. Tujuan pemberian izin penggunaan lahan dan pengalihfungsian lahan jika tidak ditinjau secara matang dan diawasi oleh hukum yang ketat dan adil maka akan sama seperti kota-kota lama sebelumnya. Penguasaan ruang kota hanya dimiliki oleh segelintir orang tertentu, terutama mereka yang memiliki posisi kelas atas dan elit. Kondisi ini tentu bertentangan dengan semboyan kota dunia untuk semua. Kata ‘semua’ ini seharusnya dapat dimaknai sebagai kesetaraan yang egaliter, keterbukaan, dan kebebasan. Tentu, pembangunan yang melibatkan biaya ekologis, sosial, dan budaya yang besar patut untuk memikirkan ulang pembentukannya makna dalam ruang dialog yang lebih baik, termasuk pengalaman masyarakat urban asli, masyarakat adat setempat, kehidupan flora/fauna yang dilindungi, serta kaum yang selama ini terpinggirkan dan terdampak pembangunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Spencer dkk. (2023) menunjukkan bahwa perpindahan satwa di sekitar wilayah IKN disebabkan oleh perubahan biodiversitas akibat pembangunan masif. Relokasi ibu kota baru ini berdampak secara langsung dalam radius sekitar 30 km dari proyek pembangunan terhadap satwa lokal di sekitar wilayah utama pembangunan. Hal ini terjadi akibat deforestasi dan kebisingan di sekitar jalan yang dibangun. Pembuatan dan pelebaran jalan hingga ribuan kilometer untuk mendukung aktivitas ekonomi ekstraktif semakin mempersempit daerah yang layak dihuni oleh satwa asli Kalimantan. Tidak hanya itu, berbagai risiko kesehatan akibat debu dan polusi udara pembangunan memengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah inti IKN. Faktor lain yang berisiko ialah tentang risiko dampak berkelanjutan dengan radius sampai dengan 200 kilometer pasca terbangunnya IKN pada tahun 2045. Perubahan biodiversitas ini mungkin terjadi akibat pembukaan lahan regional baru dan urbanisasi yang tak terkendali. Peningkatan penduduk di area urban baru dapat memunculkan interaksi yang berbahaya antara manusia dengan satwa liar bahkan menghasilkan pasar untuk produk yang diambil dari satwa, termasuk yang berstatus dilindungi dan terancam punah. Meskipun demikian, Spencer dkk. (2023) masih mempertimbangkan perubahan faktor sosial dan budaya serta politik yang mungkin saja memerlukan riset empiris lanjutan tentang perubahan dampak laju biodiversitas pasca-pembangunan IKN.

Terakhir, permasalahan-permasalahan lainnya yang belum tersampaikan dalam penelitian ini yang terus menerus akan tercipta karena adanya proses redistribusi sosio-spasial yang sedang berlangsung selama pembangunan IKN. Terlebih lagi, pembangunan IKN diekspektasikan akan berlangsung setidaknya hingga 2045. Atau, perlu setidaknya perlu enam kali pemilihan presiden, termasuk pergantian rezim pemerintahan pusat dan beberapa perubahan kebijakan yang mengatur aturan perubahan pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan IKN. Ketidakpastian kebijakan juga bukan merupakan satu-satunya faktor dari dampak redistribusi sosio-spasial yang terjadi tetapi juga perlu untuk mempertimbangkan

berbagai kemungkinan dan ketidakpastian akan kondisi krisis iklim yang semakin baru serta politik dunia, baik secara geopolitik maupun secara ekologis. Terdapat ketidakadilan antargenerasi yang mulai tercipta karena gap antara kebijakan tata ruang yang minim melibatkan generasi muda sehingga narasi rencana tata ruang yang mengkonstruksikan realitas IKN tidak bekerja secara konsisten antar satu hal dengan hal lainnya, dalam penelitian ini merujuk pada ragam tema yang ada, sehingga identitas kota dalam IKN akan selalu berkontradiksi dengan identitas spasial yang sematkan dengan identitas yang dibangun hanya berdasar dari retorika dan slogan tertentu. Artinya, ketidakpastian kondisi lanskap geospasial akan saling berkorelasi dengan dinamika dalam proses (re)distribusi sosio-spasial dalam proses pembangunan IKN di masa depan. Tantangan inilah yang perlu dipertimbangkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab politik dan etika dalam kebijakan publik bagi sebuah ‘kota dunia untuk semua’.

SIMPULAN

Proses redistribusi sosio-spasial dalam pembangunan IKN selama ini belum banyak mendapatkan perhatian bagi perkembangan ilmu sosial humaniora di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan pendekatan multidisipliner serta terlalu luasnya objek material tentang IKN itu sendiri. IKN belum terwujud secara konkret sempurna sebab masih harus melewati setidaknya tiga tahapan pembangunan IKN beberapa puluh tahun ke depan. Tentunya dalam proses pembangunan tersebut akan terdapat berbagai dinamika permasalahan dalam proses (re)distribusi sosio-spasial yang telah dipetakan sebelumnya sekitar 16 tema utama berbagai hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh komunitas ilmiah. Tidak hanya komunitas ilmiah, pembentukan wacana akan selalu berkembang dari berbagai kalangan *stakeholders* sebagai pilar yang bertanggung jawab merepresentasikan ruang kota yang ada di IKN. Berbagai slogan, simbol, moto, dan logo IKN menjadi penanda akan penciptaan ruang-ruang kota baru yang senantiasa terus menerus berkembang. Akan tetapi, pertanyaan kritis tentang pembangunan

yang selalu mengedepankan aspek kesetaraan, keadilan, nirkekerasan konflik sosial budaya serta kerusakan ekologis menjadi tantangan ketika melahirkan Ibu Kota Nusantara di masa depan. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan ruang-ruang kota Indonesia masih selalu menghantui bagaimana model pembangunan berkelanjutan diimplementasikan agar seluruh kota dapat menjadi ‘kota daerah untuk semua’.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penelitian ini merupakan bagian dari Hibah Program Peningkatan *Academic Excellence* skema C Universitas Gadjah Mada dengan No. [6530/UN1.P1/PT.01.03/2024]. Selain itu kami juga berterima kasih kepada Luthfi Baihaqi Riziq dan Al Irfani Thariq Azhar dalam proses penyempurnaan artikel penelitian ini.

PUSTAKA ACUAN

- Adinugroho, W. C., Prasetyo, L. B., Kusmana, C., & Krisnawati, H. (2022). Tracking environmental quality of Indonesia's new capital city and its surrounding area. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 950(1), 012077. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/950/1/012077>
- Adrianto, D. W., Berta, K. M. (2023). Addressing the challenges in developing Nusantara: The roles of spatial planning. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, dan Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 107-124). ISEAS.
- Akhmadi, M. H., & Himawan, A. R. (2021). Determination of financial feasibility of Indonesia's new capital road construction project using scenario analysis. *Planning Malaysia*, 19(3), 190–201. <https://doi.org/10.21837/PM.V19I17.998>
- Amir, S. (2023). Scrutinising Nusantara: The making of an authoritarian city. *Southeast Asia Working Paper Series* (5).
- Amoore, L. (2014). Power. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 571-583). Sage.
- Ardhana, I. K., & Ariyanti, N. M. P. (2023). Bali Smart Island as a lesson learnt for the new capital city Nusantara. In H. Warsilah, L. Mulyani, dan I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 201-214). Springer.
- Aulia, D. R., Putro, H., & Mufidah, L. D. (2023). Masalah perlindungan hak masyarakat adat terhadap pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299–3010.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*.
- Basuki, I. S. S. (2023). Remembering Jakarta, imagining Nusantara: Identity, space and structure. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 49-64). Springer.
- Batubara, B., Kooy, M., Leynseele, Y. V., Zwarteven, M., & Ujianto, A. (2023). Urbanization in (post-) New Order Indonesia: Connecting unevenness in the city with that in the countryside. *The Journal of Peasant Studies*, 50(3), 1207–1226. <https://doi.org/10.1080/03066150.2021.2000399>
- Berleant, A. (2005). *Aesthetics and environment: Variations on a theme*. Routledge.
- Blomley, N. (2008). The spaces of critical geography. *Progress in Human Geography*, 32(2), 285–293. <https://doi.org/10.1177/0309132507084401>
- Blunt, A., & Dowling, R. (2006). *Home*. Routledge.
- Cahyadi, R., Hidayati, D., Abdurrahim, A. Y., Miranda, T. I., Pitaloka, A. A. (2023). Sustainability of the local community's livelihoods and the idea of the modern city of Nusantara. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 225-245). ISEAS.
- Castree, N., & Wright, M. W. (2005). Home truths. *Antipode*, 37(1), 1-8.
- Chan, T. K., & Pribadi, K. S. (Eds.). (2022). *Construction in Indonesia: Looking back and moving forward*. Routledge.
- Cosgrove, D. E. (1998). *Social formation and symbolic landscape*. University of Wisconsin Press.
- Cresswell, T. (1996). *In place/out of place: Geography, ideology, and transgression*. University of Minnesota Press.
- Cresswell, T. (2013). *Geographic thought: A critical introduction*. Wiley-Blackwell.
- Daly, C. (Ed.). (2015). *The Palgrave handbook of philosophical methods*. Palgrave Macmillan.
- Fauzi, M. R., Noerwidi, S., Widiyanto, H., Handini, R., Sofian, H. O., Wibowo, U. P., Shidqqi, B. P., Geria, I. M., & Simanjuntak, T. (2023). Archaeological investigation in the future capital city of Indonesia (IKN) at Sepaku, East

- Kalimantan. *L'Anthropologie*, 127(3), 103151. <https://doi.org/10.1016/j.anthro.2023.103151>
- Featherstone, D. (2014). Politics. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 522-544). Sage.
- Graham, E. (2014). Demographies. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 649-679). Sage.
- Greenhough, B. (2014). More-than-human geographies. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 94-119). Sage.
- Gregory, D., Johnston, R., Pratt, G., Watts, M., & Whatmore, S. (Eds.). (2011). *The dictionary of human geography*. John Wiley dan Sons.
- Hairunnisa, H., & Syaka, W. A. (2022). Analisis Komunikasi Politik Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Menuju Kota Berkelanjutan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i1.8193>
- Harvey, D. (2001). *Spaces of capital: Towards a critical geography*. Routledge.
- Harvey, D. (2012). *Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution*. Verso.
- Harvey, D. (2018[1982]). *The limits to capital*. Verso.
- Harvey, D. (2019). *Spaces of global capitalism*. Verso.
- Hexagraha, S. A. A. (2018). Trajektori ko-produksi kota di Indonesia: Telaah geografi kritis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 88-116.
- Hidayat, R. (2023). Konflik agraria masyarakat adat dalam pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140-151.
- Holmes, T., Fernandes, J., & Palo, T. (2021). 'Spatio-market practices': Conceptualising the always spatial dimensions of market making practices. *AMS Review*, 11(3-4), 316-335. <https://doi.org/10.1007/s13162-021-00203-1>
- Jackson, P. (1989). *Maps of meaning*. Routledge.
- JATAM. (2023). *Nyapu: Bagaimana perempuan dan laki-laki suku Balik mengalami kehilangan, derita dan kerusakan berlapis akibat mega-proyek ibu kota baru Indonesia*. JATAM Kalimantan Timur.
- Johansyah, M., Rupang, P., Apriando, T., Zamzami, Meutia, H., Saini, A., Suhadi, Z., Birry, A. A., Nasution, M., Indradi, Y., & Prayoga, A. P. (2019). *Ibu kota baru buat siapa?*. Forest Watch Indonesia; JATAM; POKJA; Trend Asia; Walhi. trendasia.org/wp-content/uploads/2020/09/FINAL-IKN-REPORT-BAHASA-34-Hal.pdf
- Johnson, E. R. (2015). Of lobsters, laboratories, and war: Animal studies and the temporality of more-than-human encounters. *Environment and Planning D: Society and Space*, 33(2), 296-313. <https://doi.org/10.1068/d23512>
- Kamal, M. (2022). Prospects for the new capital city policy in law and economic perspectives. *Substantive Justice International Journal of Law*, 5(1), 86-108. <http://dx.doi.org/10.56087/substantivejustice.v5i1.205>
- Keith, M., & Pile, S. (Eds.). (2013). *Geographies of resistance*. Routledge.
- Khazaal, N., & Almiron, N. (Eds.). (2021). *Like an animal: Critical animal studies approaches to borders, displacement, and othering*. Brill.
- Kodir, A., Hadi, N., Astina, I.K., Taryana, D., Ratnawati, N., & Idris, (2021). The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. In Sumarmi, N. H. P. Meiji, J. H. G. Purwasih, A. Kodir, E. Andriesse, D. Ilies, & K. Miichi (Eds.), *Development, social change and environmental sustainability* (pp. 57-61). CRC Press. <http://dx.doi.org/10.1201/9781003178163-13>
- Kurniadi, A. (2019). Pemilihan ibukota negara republik Indonesia baru berdasarkan tingkat kebencanaan. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 5(2). <http://dx.doi.org/10.33172/jmb.v5i2.458>.
- Kusumaningrum, D. (2023). Melihat Kota Bekerja: Preseden dan Geografi Kota di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 257-266.
- Kusumarani, R., & Parlina, A. (2023). Crowdfunding for IKN: Potential, risk, and the people's perception. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 75-104). ISEAS.
- Kusumarani, R., Firdausy, U. F., & Rachmat. (2023). Understanding people's voice on the ideal IKN: A photovoice approach. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 99-120). Springer.
- Lau, J. M., Alami, A. N., Negara, S. D., & Nugroho, Y. (2023). *The Road to Nusantara: Process, Challenges and Opportunities*.

- Lees, L., dan Demeritt, D. (Eds.). (2023). *Concise encyclopedia of human geography*. Edward Elgar Publishing.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space* (D. Nicholson-Smith, Trans.). Blackwell.
- Lefebvre, H. (2014). *Critique of everyday life: The one-volume edition* (One-vol. ed). Verso.
- Lestari, S., Mupaat, M., & Erfina, A. (2022). Analisis sentimen masyarakat Indonesia terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia pada Twitter. *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 8(1), 13-22. <https://doi.org/10.19109/JUSIFO.V8I1.12116>
- Ma'mun, A. R. (2023). Problematika komunikasi politik pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.1-16>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1-19.
- Mahaswa, R. K. & Hardiyanti. (2023). Romanticizing the past, glorifying the future: Working with ecological modernization and developmentalism. *Dialogue and Universalism*, 33(2), 147-168. <https://doi.org/10.5840/du202333222>
- Malamassam, M. A. (2023). Population and human capital redistribution: Understanding opportunities and challenges in mass migration to Nusantara. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 173-194). ISEAS.
- Mamzer, H., & Nowak, P. (2021). Tackling animal homelessness as a social problem. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, 83, 335.
- Mayhew, S. (2015). *A dictionary of geography*. Oxford University Press.
- McDowell, L. (1999). *Gender, identity, and place: understanding feminist geographies*. University of Minnesota Press.
- McGeachan, C., & Philo, C. (2014). Words. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 545-570). Sage.
- Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital*. Verso.
- Musu, C. A., Prasetyo, M. A., Adhie, A. J., Gustawinata, M. A., & Marwandy, M. I. (2022). Undang-undang Ibu Kota Negara baru: Perdebatan kecacatan formil dan materiil pada aturannya. *Iblam Law Review*, 2(2), 79-97.
- Muttaqin, M., & Pusvita, V. (2023). Knowledge management for Nusantara's three visions: Model, system, and contents. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 231-248). Springer.
- Nalle, V. I. W. (2021). Pendekatan geografi hukum kritis dalam kajian hukum tata ruang Indonesia: Sebuah wacana filsafat hukum dan interdisiplin. *Justitia et Pax*, 37(1).
- Nasution, I. K. (2023). Geographies of Nusantara planning documents. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 33-48). Springer.
- Nightingale, A. J. (2014). Nature-society. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 120-147). Sage.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83-97. <https://online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/17417>
- Nugroho, Y., Jati, W. R., Dukarno, P. D., & Herdiansyah, I. A. (2023). Nusantara: A historical perspective. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 11-31). ISEAS.
- Nurjaman, R., & Rusata, T. (2023). Exclusion and resistance: The potential of agrarian conflicts overshadowing the new capital city. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 137-150). Springer.
- Obermayr, C. Coy, M., Hafner, R., & Töpfer, T. (2023). Lessons from Brasília: Reasoning and (un)intended consequences of a capital city relocation. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 165-184). Springer.
- Ocsanda, D., Wijaya, C. I., Al Haq, M. A., Efendi, J. D., & Prihantoro, F. (2023). Oportunitas Pembentukan Entitas Kebudayaan Baru, Tinjauan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia 2024 terhadap Perpindahan Ibu Kota Voc 1619. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 1-12.

- Olson, E. (2014). Ethics. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 423-444). Sage.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023a). *Cetak biru kota cerdas Nusantara*.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023b). *Nusantara smart building Guideline*.
- Panelli, R. (2010). More-than-human social geographies: posthuman and other possibilities. *Progress in Human Geography*, 34(1), 79-87. <https://doi.org/10.1177/0309132509105007>
- Pavlovskaya, M., & St. Martin, K. (2014). Economy. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 445-477). Sage.
- Price, P. L. (2014). Culture. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 505-521). Sage.
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153-166. <https://doi.org/10.22212/jekpv13i2.3486>
- Rachmawati, R., Haryono, E., Ghiffari, R. A., Reinhart, H., Permatasari, F. D., & Rohmah, A. A. (2021). Best practices of capital city relocation in various Countries: Literature review. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 325, p. 07004). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132507004>
- Rahman, A. R., Noor, F., & Kosandi, M. (2023). New capital city's geopolitical landscape. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 215-230). Springer.
- Ramadhan, R., Marzuki, M., Suryanto, W., Sholihun, S., Yusnaini, H., Muharsyah, R., & Hanif, M. (2022). Trends in rainfall and hydrometeorological disasters in new capital city of Indonesia from long-term satellite-based precipitation products. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 28, 100827. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100827>
- Ripaldi, Lantigimo, E. M., Sasirais, I., & Yohaness, G. T. (2022). Kesiapan Dayak Deah di Desa Kinarum dalam menyambut Ibu Kota Negara baru. *Jurnal Teologi Pambelum*, 2(1), 34-49. <https://jurnal.stt-gke.ac.id/index.php/pambelumjtp/article/view/27>
- Rohid, N., & Sukisno. (2022). Tanggapan netizen Youtube terhadap pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 5(2):191-206. <https://doi.org/10.32534/JIKE.V5I2.2777>
- Rosyadi, R., & Handayani, S. (2021). Makna Filosofi Symbol Lambang Burung Garuda Pada Desain Gedung Istana Ibu Kota Negara Baru. *MESA (Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur)*, 5(2), 12-19.
- Sabiq, M., Anwar, S. T., & Muhammad, S. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat Pedalaman: Studi Masyarakat Adat Kalimantan Timur Pada Proses Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Ilmu Sosial Indonesia (PISI)*, 1(1), 81-90.
- Safitri, E. (2024, April 25). AHY ungkap 2.086 hektare lahan di IKN belum clear. *Detik*. <https://www.detik.com/properti/berita/d-7309879/ahy-ungkap-2-086-hektare-lahan-di-ikn-belum-clear>
- Satriani, S., Adaba, P. Y., & Syafi'i, I. (2023). The transfer of the national capital (IKN): The domination of the capitalist political economy and the dynamics of local representation. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 125-149). ISEAS.
- Schmid, C. (2022). *Henri Lefebvre and the theory of the production of space*. Verso.
- Seamon, D. A. (1979). *A geography of the lifeworld: Movement, rest, and encounter*. Routledge.
- Setiawan, A. B., Nugroho, A. C., & Hamjen, H. (2023). Framework of data governance interoperability in national capital based on Indonesia's One Data policy. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 249-268). Springer.
- Simandjuntak, D., Meschede, D., & Haug, M. (2023). Identifying potential social challenges in IKN: Perspectives of civil society and villagers in East Kalimantan. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 150-172). ISEAS.
- Simatupang, O., & Pangaribuan, T. (2023). Managing culture shock in Nusantara to prevent mental health problems. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 21-32). Springer.
- Sinaga, L. C., & Khanisa. (2023). Projecting a global identity as a maritime nation in the new capital city. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara*:

- Process, challenges, and opportunities* (pp. 246-266). ISEAS.
- Siswanto, S. (2022). Analisis Tingkat Kesiapan Anggaran dan Pembiayaan Indonesia dalam Memindahkan Ibu Kota Negara: Studi Kepustakaan. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 27–41. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.27-41>
- Smith, D. (2000). *Moral geographies: Ethics in a world of difference*. Edinburgh University Press.
- Smith, N. (2008). *Uneven development: Nature, capital, and the production of space* (edisi ke-3). University of Georgia Press.
- Soja, E. (1996). *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and other real-and-imagined places*. Blackwell.
- Soja, E. W. (2011). *Postmodern geographies: The reassertion of space in critical social theory*. Verso.
- Spencer, K. L., Deere, N. J., Aini, M., Avriandy, R., Campbell-Smith, G., Cheyne, S. M., Gaveau, D. L. A., Humle, T., Hutabarat, J., Loken, B., Macdonald, D. W., Marshall, A. J., Morgans, C., Rayadin, Y., Sanchez, K. L., Spehar, S., Suanto, Sugardjito, J., Wittmer, H. U., ..., Struebig, M. J. (2023). Implications of large-scale infrastructure development for biodiversity in Indonesian Borneo. *Science of the Total Environment*, 866, 161075. <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.161075>
- Suryani, D., Aulia, D., & Utomo, M. M. B. (2023). Nusantara the green capital: Leveraging the moment for improved forest governance. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, dan Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 197-224). ISEAS.
- Susmiyati, H. R., Harjanti, W., & Al Hidayah, R. (2023). Development of the Nusantara capital, sustainable extraction for East Kalimantan. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 151-164). Springer.
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2023). Building Indonesia's new capital city: An in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. *Urban, Planning and Transport Research*, 11(1), 2276415. <https://doi.org/10.1080/21650020.2023.2276415>
- Takariani, C. S. D., Sari, D., dan Dirgahayu, D. (2023). Communication strategy for the development of the new national capital city Nusantara. In H. Warsilah, L. Mulyani, dan I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 121-136). Springer.
- Tryatmoko, M. W., & Kawamura, K. (2023). The new state capital regulations: Contending for autonomy, democracy, and legitimacy?. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 32-51). ISEAS.
- Tuan, Y. -F. (2009). *Landscapes of fear*. University of Minnesota Press.
- Virilio, P., Lotringer, S., & Taormina, M. (2001). After architecture: A conversation. *Grey Room*, 3, 33–53. <https://doi.org/10.1162/152638101300138530>
- Warf, B., & Arias, S. (2008). Introduction: The reinsertion of space into the social sciences and humanities. In B. Warf, & S. Arias (Eds.), *The spatial turn: Interdisciplinary perspectives* (pp. 1-10). Routledge.
- Warsilah, H. (2023). Reconstruction of ethnic identity in the development of a new capital city in East Kalimantan: Participation and access to city resources. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 81-98). Springer.
- Warsilah, H., Mulyani, L., & Nasution, I. K. (Eds.). (2023). *Assembling Nusantara: Mimicry, Friction, and Resonance in the New Capital Development*. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-3533-8>
- Widodo, J. (2023). The new capital is for the future, not for the present nor the past: A commentary on Nusantara project. In H. Warsilah, L. Mulyani, & I. K. Nasution (Eds.), *Assembling Nusantara: Mimicry, friction, and resonance in the new capital development* (pp. 9-20). Springer.
- Willis, K. (2014). Development. In R. Lee, N. Castree, R. Kitchin, V. Lawson, A. Paasi, C. Philo, S. Radcliffe, S. M. Roberts, & C. W. J. Withers (Eds.), *The SAGE handbook of human geography* (pp. 584-609). Sage.
- Wilson, I. D. (2023). Nusantara and the spatial implications for the practice of Indonesian democracy. In J. M. Lau, A. N. Alami, S. D. Negara, & Y. Nugroho (Eds.), *Road to Nusantara: Process, challenges, and opportunities* (pp. 52-74). ISEAS.
- Wilson, K., & Peters, E. J. (2005). "You can make a place for it": Remapping urban First Nations spaces of identity. *Environment and planning D: society and space*, 23(3), 395-413. <https://doi.org/10.1068/d390>